



**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM  
PENGEMBANGAN DESA WISATA OLEH  
DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG**  
(Studi Kasus: Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang)

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)

Program Studi Ilmu Politik

Oleh:

**Fenty Beauty Fasyikhah**  
**NIM. 3312416065**

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2020**



**UNNES**

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM  
PENGEMBANGAN DESA WISATA OLEH  
DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG**  
(Studi Kasus: Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang)

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)

Program Studi Ilmu Politik

Oleh:

**Fenty Beauty Fasyikhah**  
**NIM. 3312416065**

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang  
Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Agustus 2020

Pembimbing Skripsi,



**Drs. Setiajid, M.Si.**  
NIP. 196006231989011001

**Mengetahui,**  
Ketua Jurusan PKn UNNES



**Drs. Tijan, M.Si**  
NIP. 196211201987021001

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 25 September 2020

Penguji I

Dr. sos. Puji Hestari, S. Pd., M. Si.  
NIP.197707152001122008

Penguji II

Novia Wahyu Wardhani, S. Pd., M. Pd.  
NIP. 198811022015042001

Penguji III

Drs. Setiajid, M.Si.

NIP. 196006231989011001

Mengetahui:



Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A.

NIP. 196308021988031001

**PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulisan orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat didalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 2 September 2020

Penyusun



**FENTY BEAUTY FASYIKHAH**  
NIM 3312416065

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

- ❖ Bersikaplah realistis, jangan berharap untuk mendapatkan hasil yang berbeda, ketika anda terus melakukan hal yang sama berulang kali, agar hal-hal berubah, anda harus berubah.

### **PERSEMBAHAN**

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya Skripsi ini dengan baik dan lancar dan Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orangtua saya, Bapak Subeno dan Ibu Suliati, terima kasih atas doa dan dukungan secara moril dan materil. Segenap keluarga saya, terima kasih atas dukungan dan nasihat yang diberikan.
2. Rekan dan teman saya, Laila, Rini, Risyah, Lita, Motik, Nanda, Alfiah, Sella, teman-teman Ilmu Politik 2016 dan seluruh Jurusan Politik dan Kewarganegaraan UNNES terima kasih atas segala bentuk dukungan.

## SARI

**Fasyikhah, Fenty Beauty.** 2020. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang (studi kasus: Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang)*. jurusan Politik dan Kewarganegaraan FIS UNNES. Pembimbing Drs. Setiajid, M.Si. 183 halaman

**Kata Kunci: Pemberdayaan masyarakat, Program Pengembangan desa wisata**

Kabupaten Semarang sebagai salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah mempunyai 22 desa wisata yang tersebar didaerahnya, salah satunya yaitu desa wisata yang berada di Desa Lerep. Permasalahan kemiskinan di Desa Lerep dan masalah pencemaran lingkungan yakni pencemaran kotoran sapi yang bermula di Dusun Indrokilo. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang di Desa lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang; 2) menganalisis kendala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang ketika memberdayakan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan lokasi di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam uji validitas data yang peneliti gunakan adalah kriteria kredibilitas yaitu triangulasi. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dalam metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang sesuai dari mekanisme Peraturan Daerah No 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata dan Peraturan Gubernur No 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis dari Perda No 2 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan tahun 2020-2025. Program dari Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dalam mengembangkan desa wisata yaitu program pembinaan desa wisata, program pelatihan desa wisata, festival desa wisata, program temu mitra desa wisata, dan program sosialisasi dan promosi. Kendala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang secara internal yaitu a) pendanaan pembangunan desa wisata Lerep; b) SDM terbatas. Kemudian kendala secara eksternal yaitu 1) memperluas target pasar; 2) pengetahuan dan keterampilan masyarakat Desa Lerep terhadap desa wisata masih kurang; 3) sarana dan prasarana pariwisata kurang memadai; 4) pendanaan pembangunan desa wisata Lerep; dan 5) keterlibatan masyarakat. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu 1) Kelompok Sadar Wisata perlu meningkatkan sarana dan prasarana desa wisata; 2) Kelompok Sadar Wisata perlu dalam menemukan inovasi yang berbeda dalam pengelolaan desa wisata; 3) Kelompok Sadar Wisata perlu meningkatkan kerjasama dari berbagai *stakeholder* baik dari pemerintah maupun swasta; 4) Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang



perlu meningkatkan pelatihan dan kesadaran agar masyarakat tidak jenuh dalam pengelolaan desa wisata; dan 5) Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang perlu memberikan solusi terkait hal pendanaan bagi desa wisata.

## ABSTRACT

**Fasyikhah, Fenty Beauty.** 2020. *Community Empowerment in Tourism Village Development by the Semarang Regency Tourism Office (case study: Lerep Village, West Ungaran District, Semarang Regency)*. Department of Politics and Citizenship, FIS UNNES. Advisor Drs. Setiajid, M.Si. 183 pages.

**Keywords:** **Community empowerment, tourism village development program**

Semarang Regency as one of the districts in Central Java province has 22 tourist villages scattered in its area, one of which is a tourist village in Lerep Village. Economic problems in Lerep Village and environmental pollution problems, namely cow dung pollution, which originated in Indrokilo Hamlet. For this reason, this study aims to 1) analyze community empowerment in the development of tourism villages by the Semarang Regency Tourism Office in Lerep Village, West Ungaran District, Semarang Regency; 2) analyzing the obstacles of the Semarang Regency Tourism Office when empowering the community through the development of a tourist village in Lerep Village, West Ungaran District, Semarang Regency.

In this study using qualitative research with locations in Lerep Village, West Ungaran District, Semarang Regency. The data collection techniques that the authors use in conducting this research are interviews, observation, and documentation. In the data validity test, the researcher used the credibility criteria, namely triangulation. Triangulation used in this research is source triangulation. Triangulation with sources is comparing and checking back the degree of confidence of information obtained through different tools and times in qualitative methods.

The results of the study show that the policies of the Semarang Regency Tourism Office are in accordance with the mechanism of Regional Regulation No.2 of 2019 concerning Empowerment of Tourism Villages and Governor Regulation No.53 of 2019 concerning Technical Guidelines from Regional Regulation No.2 of 2019 and Regional Regulation of Semarang Regency No.8 of 2019 concerning the Master Plan Tourism Development 2020-2025. Programs from the Semarang Regency Tourism Office in developing tourism villages are tourism village development programs, tourism village training programs, tourism village festivals, tourism village partner gathering programs, and socialization and promotion programs. Internal constraints of the Semarang Regency Tourism Office, namely a) funding for the development of tourism villages; b) limited human resources. Then the external constraints are 1) expanding the target market; 2) the knowledge and skills of the people of Lerep Village towards tourist villages are still lacking; 3) inadequate tourism facilities and infrastructure; 4) funding for the development of the Lerep tourist village; and 5) community involvement. Suggestions that can be given in this research are 1) the Tourism Awareness Group needs to improve the facilities and infrastructure of the tourism village; 2) The Tourism Awareness Group needs to find different innovations in tourism village management; 3) The Tourism Awareness Group needs to increase cooperation from various *stakeholders*, both government and private; 4) Semarang

Regency Tourism Office needs to increase training and awareness so that the community is not bored in managing tourism villages; and 5) Semarang Regency Tourism Office needs to provide solutions related to funding for tourist villages.

## **PRAKATA**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pemberdayaan Masyarakat dalam pengembangan desa wisata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang (Studi Kasus: Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang)”**.

Penulis berterima kasih atas bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. DR. Fatur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Moh. Tijan, M.Si., Ketua Jurusan Politik dan Kewrganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
4. Drs. Setiajid, M.Si., Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, memberi petunjuk, dan saran dalam penulisan skripsi
5. Dr. sos. Puji Lestari, S. Pd., M. Si., Dosen Penguji 1 yang telah memberikan arahan dan masukan terkait dengan pembahasan skripsi.

6. Novia Wahyu Wardhani, S. Pd., M. Pd., Dosen Penguji 2 yang telah memberikan arahan dan masukan terkait dengan pembahasan dalam skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Politik dan Kewrganegaraan serta seluruh staf, karyawan Jurusan PKn, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah membekali ilmu dan membantu administrasi selama kuliah di Universitas Negeri Semarang.
8. Ibu Yuwanti, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang.
9. Bapak Tarmono, Subbag destinasi pengembangan daya tarik wisata dari Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang.
10. Bapak Taufik, Subbag Produk wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang.
11. Bapak Sumariyadi, Kepala Desa Lerep.
12. Bapak Sisyanto, Ketua Kelompok Sadar Wisata.
13. Masyarakat Desa Lerep yang telah berpartisipasi membantu saya.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
SARI.....	vi
PRAKATA.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GRAFIK.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Batasan Istilah.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR.....	15
A. Deskripsi Teoritis .....	15
1. Pemberdayaan Masyarakat.....	15
2. Pengembangan Desa Wisata .....	22
3. Dinas Pariwisata .....	33
B. Penelitian Relevan .....	35
C. Kerangka Berpikir .....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Latar Penelitian .....	44
B. Fokus Penelitian .....	45
C. Sumber Data .....	46
D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data .....	47
E. Uji Validitas Data.....	49
F. Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	53
1. Kondisi Fisik Desa Lerep .....	53
2. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Lerep.....	57
3. Kondisi Infrastruktur Desa Lerep.....	58
4. Profil Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang.....	59
B. Hasil Penelitian.....	62
1. Profil Objek Wisata Desa Lerep .....	62
2. Struktur Pengelola Desa Wisata Lerep.....	67
3. Paket Wisata Desa Wisata Lerep.....	71
4. Keterlibatan Masyarakat Desa Lerep dalam Pengembangan Desa	

Wisata .....	75
5. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang .....	79
6. Hasil Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata di Desa Lerep .....	97
7. Kendala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang .....	101
C. Pembahasan .....	114
BAB V PENUTUP.....	127
A. Simpulan .....	127
B. Saran .....	128
DAFTAR PUSTAKA .....	130
LAMPIRAN.....	132

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Wilayah Desa Lerep .....	54
Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Lerep .....	57
Tabel 3. Mata Pencaharian Desa Lerep .....	57
Tabel 4. Kepemilikan Home Stay Desa Lerep .....	73
Tabel 5. Unsur-Unsur Pengurus Pokdarwis .....	79
Tabel 6. Pelatihan Desa Wisata Lerep .....	87
Tabel 7. Kunjungan Desa Wisata Lerep .....	96
Tabel 8. Anggaran Desa Wisata Lerep .....	106
Tabel 9. Kemampuan Penggunaan Bahasa Anggota Pokdarwisa .....	109
Tabel 10. Pendidikan Kelompok Sadar Wisata .....	112



## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang .....	60
Bagan 2 Struktur Organisasi Kelompok Sadar Wisata Desa Lerep .....	69
Bagan 3 Proses Pemberdayaan Masyarakat .....	100

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Desa Lerep.....	57
Gambar 2. Curug Indrokilo .....	63
Gambar 3. Puncak Kayangan Indrokilo .....	64
Gambar 4. Kesenian Reog.....	64
Gambar 5. Tari Caping Gunung.....	65
Gambar 6. Embung Sembligo .....	66
Gambar 7. Kampung Sapi Indrokil .....	66
Gambar 8. Pembuatan Gula Aren .....	67
Gambar 9. Kopi Ceplus.....	67
Gambar 10. Lodek.....	68
Gambar 11. Paket Wisata Desa Lerep.....	74
Gambar 12. Home Stay .....	76

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian.....	133
Lampiran 2. Surat Balasan Izin Penelitian.....	135
Lampiran 3. Surat Keterangan Dosen Pembimbing Skripsi .....	136
Lampiran 4. Anggaran Desa Wisata Lerep .....	137
Lampiran 5. Anggaran Rumah Tangga Desa Wisata Lerep .....	140
Lampiran 6. Anggaran Dana Desa Wisata Lerep.....	142
Lampiran 7. Pendapatan Desa Wisata Lerep Tahun 2018/2019 .....	143
Lampiran 8. Data Sumber Daya Manusia Pokdarwis .....	145
Lampiran 9. Instrumen Penelitian .....	148
Lampiran 10. Pedoman Wawancara .....	163
Lampiran 11. Hasil Wawancara.....	168
Lampiran 12. Dokumentasi .....	183

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kabupaten Semarang sebagai salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah memiliki luas 950.207 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 1.040.629 jiwa, Kabupaten Semarang memiliki 208 desa dan 27 kelurahan dari 19 kecamatan yang disebutkan dalam data statistik Kabupaten Semarang. Salah satu desa yang menjadi desa wisata yaitu Desa Lerep. Desa Lerep adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang yang memiliki luas 682,32 Ha. Desa Lerep memiliki 10 RW dan 68 RT dari 8 dusun. Sebagian besar wilayah merupakan daerah perbukitan dengan topografi lereng/puncak, permukiman tertinggi adalah Dusun Indrokilo dan permukiman terendah adalah Dusun Mapagan.

Desa Lerep merupakan desa yang memiliki banyak potensi alam dan kearifan lokal yang layak untuk dikembangkan. Maka dari itu, pemerintah setempat melakukan sebuah pendekatan dan pendampingan terhadap masyarakat dalam membangun kesadaran dan melek terhadap potensi desa yang mempunyai manfaat besar dalam kehidupan masyarakat. Dengan dicanangkannya desa wisata di Desa Lerep menjadikan kemajuan dan kemandirian desa untuk tetap mencari inovasi dalam mengembangkan desa wisata. Sebelum dicanangkannya desa wisata di Desa Lerep terdapat banyak pemuda yang belum mempunyai pekerjaan atau menganggur

dengan dicanangkannya desa wisata ini memberikan peluang lapangan pekerjaan terutama masyarakat dari Desa Lerep dan dengan adanya desa wisata ini memberikan daya tarik wisatawan untuk berkunjung sehingga otomatis usaha produk lokal masyarakat menjadi lebih dikenal. Kemudian, masalah lingkungan yang memberikan dampak negatif pada Desa Lerep, yakni pencemaran kotoran sapi yang bermula di Dusun Indrokilo. Karena minimnya pengetahuan dalam pola pemeliharaan kandang sapi yang baik dan bersih, masih banyak masyarakat Desa Lerep yang ternak di tengah pemukiman warga, sehingga mengakibatkan pencemaran saluran air dan bau tidak sedap. Secara geografis, lokasi Dusun Indrokilo berada di pemukiman tertinggi di Desa Lerep sehingga kotoran sapi tersebut mencemari sumber air di dusun-dusun yang ada dibawahnya. Dengan begitu, Kepala Desa Lerep memprogramkan penempatan ternak sapi di tanah desa. Dari hal ini, peternak mampu memanfaatkan kotoran sapi menjadi biogas dan pupuk organik. Sehingga hal tersebut menarik perhatian dari luar desa, studi banding, dan pemerhati lingkungan seperti LSM dari Jepang yaitu *Live with friends on the earth*, dan GIZ or *The Deutsche Gesellchaf Fur Internationale Zusammenarbeit* dari Jerman (Sumber: hasil wawancara Kepala Desa Lerep tanggal 7 November 2019).

UU No 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa hakikat pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta

memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Menyadari bahwa terdapat potensi yang dapat dikelola dan dimanfaatkan maka dari pemerintah setempat yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang memberikan pemberdayaan pada masyarakat Desa Lerep. Demikian, potensi yang ada di Desa Lerep diantaranya dapat dijadikan wisata alam, edukasi, budaya, kuliner, dan air. Potensi-potensi yang ada di Desa Lerep dapat dimanfaatkan sebagai daerah wisata atau desa wisata dengan topografi dataran tinggi. Potensi Desa Lerep yang menjadi desa wisata, didukung dengan dikeluarkannya surat keputusan Bupati Nomor: 556/0424/2015 yang menetapkan Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat sebagai desa wisata. Demikian, peneliti melakukan wawancara awal dengan Sumariyadi sebagai Kepala Desa Lerep, menyatakan bahwa:

"Sering ada kunjungan sehingga kita disorot sama kabupaten, sebaiknya dibuat desa wisata, baru tahun 2015 diundang ke dinas pariwisata diberikan penjelasan, ini bisa dipaketkan desa wisata kemudian kita diberikan pelatihan dan lain sebagainya. Sehingga tahun 2015 kita di SK oleh Bupati untuk menjadi desa wisata, berhubung ini kita tidak bisa bergerak apa-apa, bekal pengetahuan kita belum cukup kemudian akhir tahun 2016 mendeklirkan diri menjadi desa wisata, diadakan lomba tumpeng. Kemudian seluruh warga berkumpul di sana. Itu baru kita memulai kegiatan desa wisata" (sumber: hasil wawancara tanggal 7 November 2019).

Dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat, masyarakat mempunyai kesempatan dan wewenang untuk mengelola proses

pembangunan, masyarakat dapat melihat kondisi permasalahan, potensi desa secara keseluruhan serta aspirasi kebutuhan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini merupakan sebuah bentuk pembangunan yang berpusat pada manusia, dan merupakan bentuk pembangunan yang direncanakan sesuai dengan potensi, masalah, dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal memberdayakan masyarakat perlunya keterlibatan masyarakat dari berbagai elemen, sangat diharapkan berperan aktif dalam upaya pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan partisipasi dan kesadaran kritis masyarakat dalam membangun sebuah desa wisata, diperlukan keberanian dan kesadaran untuk menggali potensi yang ada di dalam desa.

Kemampuan masyarakat untuk mewujudkan dan mempengaruhi arah serta pelaksanaan suatu program ditentukan dengan mengandalkan *power* yang dimilikinya sehingga pemberdayaan (*empowerment*) merupakan tema sentral atau jiwa partisipasi yang sifatnya aktif dan kreatif (Nasdian, 2015:91). Pelibatan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan memerlukan bentuk sinergitas antara masyarakat desa dengan pemerintah desa. Dengan begitu, hasil dari setiap proses pengembangan desa wisata diharapkan menjadi lebih optimal. Pengembangan Desa Lerep tidak lepas dari keterlibatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, terdapat pro dan kontra masyarakat Desa Lerep mengenai dicanangkannya desa wisata ini, banyak masyarakat yang kontra sehingga pemerintah desa memberikan

pemahaman sehingga perlahan-lahan masyarakat mulai sadar manfaat dari desa wisata.

Strategi pengembangan Desa Wisata Lerep oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang yaitu dengan memberdayakan masyarakat lokal dengan memberikan program pembinaan desa wisata, festival desa wisata, sosialisasi dan promosi, temu mitra dan pelatihan atau *workshop*. Dalam penerapannya Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang sesuai dengan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata dan petunjuk teknis Peraturan Gubernur No 53 Tahun 2019, dan dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Semarang, Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisatahan tahun 2020-2025. Tujuan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dalam membangun kepariwisataan yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata sehingga meningkatkan pendapatan daerah; tersebarluasnya informasi destinasi pariwisata dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan; terwujudnya industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat; dan berkembangnya kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata (sumber: hasil



wawancara Bapak Tarmono dari Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang tanggal 12 Februari 2020).

Strategi *community based-tourism*, ini dapat digunakan dalam pengembangan *rural tourism* yang didasarkan pada pengembangan masyarakat dengan cara mengandalkan mereka sendiri, pemberdayaan, keberlanjutan, konservasi, dan peningkatan budaya untuk meningkatkan mata pencaharian penduduk. *Community based-tourism* merupakan pariwisata yang dikelola dan dimiliki oleh masyarakat, untuk masyarakat, dengan tujuan agar wisatawan dapat meningkatkan kesadaran mereka dan belajar tentang kehidupan masyarakat lokal serta dapat meningkatkan ekonomi masyarakat lokal (Phu dalam Antara & Arida, 2015:9). Pemerintah desa dalam menangani pengelolaan dan pengurusan mengenai desa wisata membentuk membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di masing-masing dusun dengan menyatukan pemikiran-pemikiran masyarakat bahwa desa wisata dapat meningkatkan nilai jual yang menjanjikan dan banyak pengunjung yang tertarik terhadap Desa Lerep. Tujuan dari pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) adalah: 1) meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah; 2) membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-

nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat; 3) memperkenalkan, melestarikan, dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di masing-masing daerah (Rahim, 2012:18).

Pembangunan pariwisata sebagai pertumbuhan ekonomi, makna ini fokus pada kuantitas produksi dan penggunaan sumber-sumber atau potensi dari desa. Menurut Undang-Undang Kepariwisatanan Nomor 10 Tahun 2009, dijelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Rahim (2012:3) menyatakan peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan memerlukan berbagai upaya pemberdayaan (*empowerment*), agar masyarakat dapat berperan lebih aktif dan optimal serta sekaligus menerima manfaat positif dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan untuk peningkatan kesejahteraan.

Nuryanti mengemukakan bahwa desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Sedangkan menurut Joshi Desa wisata (*rural tourism*) merupakan pariwisata yang terdiri dari keseluruhan pengalaman pedesaan, atraksi alam, tradisi, unsur-unsur yang unik yang secara keseluruhan dapat menarik minat wisatawan (dalam Antara & Arida, 2015:7). Desa wisata Lerep memiliki paketan wisata yang ditawarkan

berupa paket wisata Ndeso dan paket wisata program kampung iklim (proklim). Di Desa Lerep dalam mempromosikan paket wisatanya menggunakan media *online* karena cara pemasaran ini dapat diakses oleh wisatawan kapanpun dan dimanapun, yaitu menggunakan *platform website*, *instagram*, *twitter*, dan *facebook*. Terkait pengembangan desa wisata, Desa Lerep memberikan fasilitas *homestay* bagi wisatawan yang berasal dari luar daerah, hingga saat ini terdapat 60 *homestay* yang ada di Desa Lerep. Dalam pengelolaan desa wisata masyarakat Desa Lerep terlibat dalam perencanaan desa wisata, penataan lingkungan, pembersihan, menerima tamu, menjajakan jajanan dan paguyuban ojek untuk antar jemput tamu. Maka dari itu, peranan masyarakat Desa Lerep ini sangat penting dalam pengembangan desa wisata. Pemberdayaan masyarakat yang menjadi salah satu strategi dalam rangka mewujudkan kemajuan desa, meningkatkan pengembangan industri kecil, dan dampak ekonomi pada skala desa terkait dengan sektor pariwisata. Kehadiran desa wisata diharapkan mampu memberikan dampak ganda (*multiplier effect*), dimana desa wisata diharapkan dapat menjadi alat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menjadi agen perubahan bagi kemajuan pengembangan suatu daerah.

Mengembangkan suatu desa menjadi desa wisata harus menggali dan mengidentifikasi potensi-potensi desa (alam, budaya, buatan manusia) yang menarik dilihat dan dikunjungi wisatawan. Dari adanya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata sejauh ini

manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Desa Lerep yaitu peningkatan pendapatan masyarakat, peluang lapangan pekerjaan, dan peningkatan usaha produk lokal.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkajinya dengan judul **“Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang” (Studi Kasus: Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang)**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang?
2. Apa saja kendala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang ketika memberdayakan masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Desa lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

1. untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang di Desa lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.

2. untuk menganalisis kendala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang ketika memberdayakan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Irep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. penelitian ini dapat dipergunakan untuk menambah kajian lingkup dalam pengembangan daerah wisata.
- b. memberikan manfaat yang dapat digunakan sebagai referensi bagi yang akan melakukan penelitian sejenis. Oleh karena itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian-kajian yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. bagi peneliti, dengan melakukan penelitian ini diharapkan peneliti dapat mendapatkan pengetahuan atau pengalaman nyata mengenai pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang di Desa Irep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang dan kendala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dalam upaya

memberdayakan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.

- b. bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terkait kajian desa wisata di Desa Lerep yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi dan penelitian ini dapat menjelaskan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang.
- c. bagi masyarakat, penelitian ini nantinya akan memberikan informasi mengenai pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata kepada seluruh masyarakat Indonesia.

#### **E. Batasan Istilah**

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa batasan istilah untuk memperjelas kata maksud yang hendak disampaikan agar tidak terjadi pengertian yang menyimpang dari judul penelitian ini, sebagai berikut.

##### **1. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan merupakan suatu proses dalam pembangunan yang membuat masyarakat mandiri dan berinisiatif untuk peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Masyarakat diberikan kesempatan untuk mengelola dan membangun suatu potensi dan sumber daya lokal di daerah. Pemberdayaan masyarakat adalah proses

pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut berpartisipasi (Maryani & Nainggolan, 2019: 8). Dalam penelitian ini, masyarakat diberdayakan melalui program Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang yaitu program pembinaan desa wisata, festival desa wisata, program sosialisasi dan promosi, temu mitra, dan pelatihan *workshop* desa wisata.

## 2. Dinas Pariwisata

Dinas pariwisata adalah unsur penyelenggara dan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pariwisata dan bidang kebudayaan. Dalam penelitian ini, Dinas Pariwisata sebagai pendampingan dan pembinaan masyarakat Desa Lerep dalam mengimplementasikan program desa wisata sesuai Perda No 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata dan petunjuk teknis Peraturan Gubernur No 53 Tahun 2019.

## 3. Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengatur dan melaksanakan pemerintahan di tingkat desa yang dikepalai kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa. Menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa pemerintah desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Dalam penelitian ini, pemerintah desa yang dimaksud adalah pemerintah Desa Lerep, yaitu sebagai pelaksana dalam menjalankan arahan atau program-program yang diberikan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang.

#### 4. Kelompok Sadar Wisata

Kelompok Sadar Wisata adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar (Rahim, 2012:16).

Kelompok sadar wisata yang dimaksud dalam penelitian ini adalah komponen dalam masyarakat yang memiliki peran dan kontribusi penting dalam pengembangan kepariwisataan didaerahnya. Keberadaan Pokdarwis tersebut perlu terus didukung dan dibina sehingga dapat berperan lebih efektif dalam turut menggerakkan partisipasi masyarakat.

#### 5. Pengembangan desa wisata

Pengembangan desa wisata, secara substansial pengembangannya senantiasa berbasis pada pemberdayaan masyarakat (*community-based tourism development*). Pengembangan Desa wisata sebagai salah satu produk pariwisata yang berbasis pada masyarakat tersebut dilakukan dalam rangka memberikan kesempatan masyarakat untuk turut



berpartisipasi dalam pengelolaan pariwisata didesanya. Desa wisata adalah wilayah pedesaan dengan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian desa meliputi: struktur, ruang, arsitektur bangunan, pola kehidupan sosial budaya masyarakat yang menyediakan bagi kebutuhan pokok wisatawan (Pitana dalam Marsono, 2019:7) Pengembangan desa wisata yang dimaksud dalam penelitian ini adalah strategi dan kebijakan dalam mengembangkan potensi, sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR**

#### **A. Deskripsi Teoritis**

##### **1. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa wisata merupakan hal yang penting ketika melibatkan masyarakat, di mana masyarakat yang paling tahu apa yang dibutuhkan. Partisipasi yang baik akan melibatkan masyarakat dalam keseluruhan tahapan pengembangan, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan program pengembangan desa wisata. Keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat ini sangat dipengaruhi oleh kemauan, kesempatan, dan kemampuan dari masyarakat tersebut. Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan desa wisata dapat mendorong mereka berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan.

##### **a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat**

Eddy Ch. Papilaya dalam Zubaedi (2013:24), mengemukakan pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga miskin untuk menentukan masa depannya sendiri

dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakatnya. Strategi pemberdayaan yang lengkap menuntut bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dalam menggunakan kekuatannya dipahami, diperhatikan, dan dipecahkan. Perlu dipahami bahwa pemberdayaan merupakan pekerjaan yang membutuhkan waktu, energi, dan komitmen, serta hasilnya belum tentu memuaskan.

Anwas (2013:49) mengemukakan bahwa pengertian pemberdayaan (*empowerment*) tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan pada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya.

Berdasarkan beberapa definisi pemberdayaan menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk mengembangkan dan membangun masyarakat dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran untuk memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada di dalam tempat tinggalnya.

#### **b. Upaya-upaya dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Upaya pemberdayaan masyarakat perlu didasari pemahaman bahwa munculnya ketidakberdayaan masyarakat akibat masyarakat tidak memiliki kekuatan (*powerless*). Iffe Jim dalam Zubaedi (2013:27), mengidentifikasi beberapa jenis kekuatan yang dimiliki masyarakat dan dapat digunakan untuk memberdayakan mereka:

- 1) kekuatan atas pilihan pribadi. Upaya pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan pribadi atau kesempatan untuk hidup lebih baik.
- 2) kekuatan dalam menentukan kebutuhannya sendiri. Pemberdayaan dilakukan dengan mendampingi mereka untuk merumuskan kebutuhannya sendiri.
- 3) kekuatan dalam kebebasan berekspresi. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengembangkan kapasitas mereka untuk bebas berekspresi dalam bentuk budaya publik.
- 4) kekuatan kelembagaan. Pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap kelembagaan pendidikan, kesehatan, keluarga, keagamaan, sistem kesejahteraan sosial, struktur pemerintahan, media dan sebagainya.
- 5) kekuatan sumberdaya ekonomi. Pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas dan kontrol terhadap aktivitas ekonomi.

Upaya dalam memberdayakan kelompok masyarakat dapat dilakukan dengan tiga strategi. Pertama, pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan, dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Kedua, pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik yang dilakukan perjuangan politik

dan gerakan dalam rangka membangun kekuasaan yang efektif. Ketiga, pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas. Upaya ini dilakukan dalam rangka membekali pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat lapisan bawah dan meningkatkan kekuatan mereka.

### **c. Manfaat Pemberdayaan**

Dalam pemberdayaan ini dilakukan secara sinergis untuk mendorong keterlibatan semua potensi yang ada, terdapat manfaat dalam pemberdayaan masyarakat desa yaitu:

- 1) menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Potensi terhadap kemandirian individu yang perlu diberdayakan, yang bersumber dari proses kemandirian tiap individu yang meluas kekeluarga, kelompok serta masyarakat.
- 2) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana, dan sasaran yang baik fisik di bidang irigasi, jalan, dan listrik. Maupun bidang sosial sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. Terbentuknya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat akan berdaya, seperti tersedianya lembaga-lembaga di bidang pendanaan, pelatihan, dan pemasaran. Dalam

upaya pemberdayaan masyarakat ini yang paling terpenting antara lain adalah peningkatan mutu dan perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan, serta akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.

- 3) memberdayakan masyarakat dengan maksud melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah di bidang sosial ekonomi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau mungkin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat oleh karenanya, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah (Damanik, 2019: 10).

#### **d. Strategi Pemberdayaan**

Pemberdayaan ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat agar mampu berdaya sehingga ia dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Namun keberhasilan pemberdayaan tidak sekedar menekankan pada hasil, tetapi juga pada prosesnya melalui tingkat partisipasi yang tinggi, yang berbasis kepada kebutuhan dan potensi masyarakat. Untuk meraih keberhasilan itu, agen pemberdayaan dapat melakukan pendekatan *bottom-up*, dengan cara menggali potensi, masalah, dan kebutuhan masyarakat.

Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Suharto dalam Anwas (2013:87) mengemukakan bahwa penerapan pendekatan pemberdayaan dilakukan melalui 5P yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) pemungkinan; menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekarat-sekarat kultural dan struktur yang menghambat.
- 2) penguatan; memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- 3) perlindungan; melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan lemah, dan mencegah adanya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- 4) penyokongan; memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas

kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan teringgirkan.

- 5) pemeliharaan; memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Keberagaman masyarakat yang memiliki karakter-karakter yang berbeda akan mempengaruhi terhadap agen pemberdayaan dalam memilih cara atau teknik pelaksanaan. Hal ini, tentu mempengaruhi keberhasilan proses dan hasil dari pemberdayaan tersebut. Dubois dan Miley (dalam Anwas, 2013:88) menjelaskan empat cara dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a) membangun relasi pertolongan yang diwujudkan dalam bentuk: merefleksikan respon rasa empati terhadap sasaran, menghargai pilihan dan hak klien/sasaran untuk menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*), menghargai perbedaan dan keunikan individu, serta menekankan kerjasama Klien (*client partnership*).
- b) membangun komunikasi yang diwujudkan dalam bentuk menghormati dan harga diri klien/sasaran, mempertimbangkan keragaman individu, berfokus pada klien, serta menjaga kerahasiaan yang dimiliki oleh klien/sasaran.



- c) terlibat dalam pemecahan masalah yang dapat diwujudkan dalam bentuk: memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah, menghargai hak-hak klien, merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar, serta melibatkan klien/ sasaran dalam membuat keputusan dan kegiatan evaluasinya.
- d) merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial yang diwujudkan dalam bentuk: ketaatan terhadap kode etik profesi; keterlibatan dalam pengembangan profesional, melakukan riset, dan perumusan kebijakan; penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu public, serta penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

## **2. Pengembangan Desa Wisata**

### **a. Pengertian Desa Wisata**

Suwantoro dalam Amerta (2019:27) mengemukakan bahwa desa wisata adalah suatu wilayah pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan, baik tata ruang, arsitektur bangunan, maupun pola kehidupan sosial budaya masyarakat, adat istiadat keseharian. Di samping itu, mampu menyediakan komponen-komponen kebutuhan pokok wisatawan, seperti akomodasi, makanan dan minuman, cendera mata, dan atraksi-atraksi wisata. Berdasarkan definisi desa wisata tersebut,

diketahui bahwa substansi yang terkandung dalam desa wisata adalah pengembangan suatu wilayah desa memanfaatkan berbagai potensi dan kemampuan unsur-unsur yang ada dalam masyarakat desa yang berfungsi sebagai atribut produk wisata, menjadi suatu rangkaian aktivitas pariwisata yang terpadu. Selain itu, wisatawan akan mendapat pengalaman baru mengenai kehidupan masyarakat pedesaan dan lingkungannya.

Desa wisata adalah pemahaman terhadap karakter dan kemampuan unsur-unsur yang ada di desa tersebut termasuk pengetahuan dan kemampuan lokal (*indigenous knowledge*) dan kearifan lokal (*local wisdom*) yang dimiliki oleh masyarakat. Adapun yang dimaksudkan pemahaman unsur-unsur desa adalah menghimpun semua atribut-atribut potensial pembentuk produk sebagai dasar perencanaan dan pengemasan desa. unsur-unsur yang dimaksudkan mencakup lingkungan makro yang terdiri atas aspek (1) lingkungan alam, (2) sosial ekonomi dan budaya masyarakat, sedangkan lingkungan mikro yang mencakup (1) arsitektural dan struktur tata ruang serta (2) aspek historis dan lain-lain.

Nuryanti (dalam Antara & Arida, 2015:7) mengemukakan desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Terdapat dua konsep yang utama dalam komponen desa wisata : (a)

Akomodasi, sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk; dan (b) Atraksi, seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta *setting* fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif seperti kursus tari, kursus kerajinan khas daerah, bahasa dan lain-lain yang spesifik. Fasilitas lain yang masih sangat diperlukan dalam kawasan desa wisata antara lain adalah sarana transportasi, telekomunikasi (desa digital), kesehatan, dan juga akomodasi. Khusus untuk sarana akomodasi, desa wisata bisa juga menyediakan sarana penginapan berupa pondok-pondok wisata (*homestay*) yang nyaman dan bersih. Kriteria untuk menentukan klasifikasi desa wisata bisa mempertimbangkan beberapa hal seperti kondisi objek dan daya tarik wisata tersebut, komunitas masyarakat yang menunjukkan siap berpartisipasi mendukung pariwisata, kondisi jalan menuju objek, keamanan, dan kenyamanan pengunjung, kebersihan lingkungan, pemetaan fasilitas yang mendukung objek dan daya tarik wisata, ketersediaan fasilitas pendukung dalam memenuhi kebutuhan para pengunjung. Desa wisata merupakan kelompok masyarakat yang perlu dibina pemerintah agar mereka sadar wisata. Desa wisata yang dibina itu adalah masyarakat yang berada di sekitar lokasi wisata (objek wisata). Desa wisata ini hendaknya merupakan sebuah kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus

untuk menjadi daerah tujuan wisata. Karakteristik desa wisata tersebut seperti penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang *relative* masih asli. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian, dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa wisata (Zebuah, 2016: 36).

Keberhasilan suatu desa wisata sebagai destinasi seperti dikatakan oleh Jusuf Sudadi ditentukan oleh lima unsur sebagai berikut:

- 1) produk atraksi sebagai daya tarik wisata menarik, misalnya: alam diolah sehingga menarik, budaya diolah sehingga menarik, dan kuliner;
- 2) infrastruktur jalan;
- 3) fasilitas/amenitas tempat menerima pengunjung tersedia;
- 4) lembaga pengelola yang melakukan manajemen: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi;
- 5) perlunya sapta pesona: aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan (dalam Marsono, 2019:4).

## **b. Pariwisata**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang kepariwisataan; pengertian tentang kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat,

sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Pariwisata mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan, menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2009, Pariwisata adalah bagian integral dari pengembangan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup di dalam masyarakat, melestarikan dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional.

Perkembangan pariwisata secara berkelanjutan menjadi prioritas pemerintah yang membawa perkembangan yang sangat cepat. Potensi wisata yang beranekaragam yang tersebar di setiap daerah tujuan pariwisata dilestarikan dan dikembangkan, karena dapat membawa dampak positif maupun dampak negatif bagi pelestarian budaya, perekonomian, peningkatan pendidikan dan agama. Selain itu juga perkembangan destinasi wisata dapat memberikan kontribusi terhadap pemerintah daerah.

Weaver & Lawton dalam Prasetyo & Arifin (2018:13), mendefinisikan pariwisata sebagai jumlah proses, aktivitas, dan hasil yang timbul dari hubungan dan interaksi antara wisatawan, pemasok pariwisata, pemerintah tuan rumah, masyarakat tuan rumah, dan lingkungan sekitar yang terlibat dalam menarik, mengangkut, hosting dan pengelolaan turis dan pengunjung lainnya. Dengan demikian

pariwisata biasanya dipandang multidimensional, memiliki karakteristik fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Pendapat Matthieson dan Wall dalam Supriadi,dkk. (2017:8) mengenai definisi pariwisata sebagai perpindahan tempat sifatnya sementara yang dilakukan oleh seseorang ke tempat tujuan diluar tempat kediaman dan tempat tinggal mereka, dengan melakukan berbagai kegiatan selama tinggal di tempat tujuan dengan berbagai fasilitas-fasilitas untuk emenuhi kebutuhannya. WTO pada tahun 1991 juga telah mendefinisikan “pariwisata” sebagai berikut: kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang di luar lingkungannya kurang dari jangka waktu tertentu dan tujuan utama perjalanannya adalah untuk melakukan kegiatan di tempat yang dikunjungi.

### c. Strategi Pengembangan Desa Wisata

Purnamasari dalam Damanik (2018:24) mengemukakan bahwa terdapat strategi desa yang telah dikembangkan antara lain pendekatan dari atas (*top down*), pendekatan dari bawah (*bottom up*) dan pendekatan pengeolaan mandiri oleh masyarakat desa (*community based management*). Perlu dipahami bahwa pembangunan memerlukan perencanaan karena kebutuhan pembangunan lebih besar dari pada sumber daya yag tersedia. Selain itu unsur-unsur keseimbangan dan keadilan diperlukan dalam pembangunan. Hal ini akan mengurangi ketimpangan. Melalui

perencanaan kemudian dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada. Prinsip ini perlu diterapkan dalam pembangunan pariwisata. Wood (2002) mengungkapkan bahwa sebuah program pariwisata yang baik harus mengikutsertakan beberapa elemen berikut: konservasi atas biodiversiti berkelanjutan, mengikutsertakan masyarakat lokal, memberikan interpretasi dan menambah pengalaman, mendorong melakukan aksi positif, mendorong berkembangnya industri kecil, konservasi sumber daya tidak terbarukan, memfokuskan pada partisipasi lokal dan kesempatan berusaha bagi masyarakat pedesaan.

Butler dalam Amerta (2019:14) mengemukakan bahwa terdapat enam tahap pengembangan pariwisata yang membawa implikasi serta dampak yang berbeda, secara teoritis, yaitu sebagai berikut:

- 1) tahap eksplorasi, pertumbuhan spontan dan penajajakan (*exploration*). Pada tahap ini jumlah wisatawan petualang relative kecil. Mereka cenderung dihadapkan pada keindahan alam dan budaya yang masih alami di daerah tujuan wisata. Fasilitas pariwisata dan kemudahan yang didapat wisatawan juga kurang baik. Atraksi di daerah wisata belum berubah oleh pariwisata dan kontak dengan masyarakat lokal relative tinggi.

- 2) tahap keterlibatan (*involment*), pada tahap ini mulai adanya inisiatif masyarakat lokal menyediakan fasilitas wisata, kemudian promosi daerah wisata dimulai dengan dibantu oleh keterlibatan pemerintah. Hasilnya terjadinya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.
- 3) tahap pengembangan dan pembangunan (*development*), pada tahap ini jumlah wisatawan yang datang meningkat tajam. Pada musim puncak wisatawan biasanya menyamai, bahkan melebihi jumlah penduduk lokal. Investor luar berdatangan memperbaiki fasilitas. Sejalan dengan meningkatnya jumlah dan popularitas daerah pariwisata, masalah-masalah rusaknya fasilitas mulai terjadi. Perencanaan dan kontrol secara nasional dan regional menjadi dibutuhkan, bukan hanya untuk pemecahan masalah yang terjadi, melainkan juga untuk pemasaran internasional.
- 4) tahap konsolidasi (*consolidation*), pada tahap ini tingkat pertumbuhan sudah mulai menurun walupun total jumlah wisatawan masih relatif meningkat. Daerah pariwisata belum berpengalaman mengatasi masalah dan kecenderungan terjadinya monopoli yang sangat kuat.
- 5) tahap kestabilan (*stagnation*), pada tahap ini jumlah wisatawan yang datang berada pada puncaknya. Artinya, wisatawan tidak mampu lagi dilayani oleh daerah tujuan wisata. Ini disadari bahwa kunjungan ulangan wisatawan dan pemanfaatan bisnis dan komponen-komponen lain pendukungnya dibutuhkan untuk



mempertahankan jumlah wisatawan yang berkunjung. Daerah tujuan wisata mungkin mengalami masalah-masalah lingkungan, sosial, dan ekonomi.

6) tahap penurunan kualitas (*decline*) dan kelahiran baru (*rejuvenation*), pada tahap *decline*, pengunjung kehilangan daerah tujuan wisata yang diketahui semula dan menjadi ‘*resort*’ baru. ‘*resort*’ menjadi bergantung pada sebuah daerah tangkapan secara geografi lebih kecil untuk perjalanan harian dan kunjungan berakhir pekan. Kepemilikan berpeluang kuat untuk berubah dan fasilitas-fasilitas pariwisata, seperti akomodasi akan berubah pemanfaatannya. Akhirnya, pengambilan kebijakan mengakui tingkatan ini dan memutuskan untuk dikembangkan sebagai ‘kelahiran baru’. Selanjutnya terjadi kebijaksanaan baru dalam berbagai bidang, seperti pemanfaatan, pemasaran, saluran distribusi, an menjau kembali posisi daerah tujuan wisata tersebut.

Dari definisi di atas diketahui bahwa yang dimaksud pengembangan adalah suatu aktivitas memajukan desa wisata dengan menggali berbagai potensi yang bisa dikembangkan menjadi suatu daya tarik wisata alternatif. Aktivitas tersebut dikelola oleh masyarakat lokal, ramah lingkungan, berkelanjutan, serta dapat meningkatkan kehidupan sosial budaya dan kesejahteraan masyarakat.

#### **d. Dampak Pariwisata**

Dampak dari adanya pariwisata terhadap masyarakat dan daerah tujuan wisata, adapun dampak-dampak pariwisata dari segi sosial-ekonomi dan sosial budaya yaitu:

1. dampak sosial ekonomi, dampak pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal dapat dikategorikan menjadi 8 kelompok besar, yaitu:

- a) dampak terhadap penerimaan devisa,
- b) dampak terhadap pendapatan masyarakat,
- c) dampak terhadap kesempatan kerja,
- d) dampak terhadap harga-harga,
- e) dampak terhadap distribusi manfaat atau keuntungan,
- f) dampak terhadap kepemilikan dan kontrol,
- g) dampak terhadap pembangunan pada umumnya, dan
- h) dampak terhadap pendapatan pemerintah.

2. Dampak sosial budaya, secara teoritis dampak sosial budaya di kelompokkan menjadi 10 mengelompokkan dampak sosial budaya pariwisata ke dalam 10 kelompok besar yaitu:

- a) dampak terhadap keterkaitan dan keterlibatan antara masyarakat setempat dengan masyarakat yang lebih luas termasuk tingkat otonomi atau ketergantungannya;
- b) dampak terhadap hubungan interpersonal antara anggota masyarakat;

- c) dampak terhadap dasar-dasar organisasi/ atau kelembagaan sosial;
- d) dampak terhadap migrasi dari dan ke daerah pariwisata;
- e) dampak terhadap ritme kehidupan sosial masyarakat;
- f) dampak terhadap pola pembagian kerja;
- g) dampak terhadap stratifikasi dan mobilitas sosial;
- h) dampak terhadap distribusi pengaruh dan kekuasaan;
- i) dampak terhadap meningkatnya penyimpangan penyimpangan sosial; dan
- j) dampak terhadap bidang kesenian dan adat istiadat (Cohen dalam Pitana, 2005:109-110).

**e. Kebijakan Pariwisata**

Fennel (1999) mengemukakan bahwa perencanaan pariwisata memerlukan kebijakan, maksud dan tujuan untuk diimplementasikan dalam proses perencanaan serta pelaksanaan biasanya dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, Gunn (1988) mengemukakan bahwa untuk rencana yang akan dilaksanakan diperlukan pemerintahan dan kombinasi antara tanggung jawab sektor swasta dan publik dalam perencanaan. Lickorish (1991) menyatakan bahwa pemerintah sering melihat tanggung jawab kebijakan pariwisata sebagai pemangku sektor pribadi/swasta. Williams (1998) dan Hall dan Jenkins (1995) menunjukkan bahwa perencanaan pariwisata melibatkan kedua badan-badan sektor publik dan swasta. Hal ini merupakan salah satu dari

beberapa alasan mengapa perencanaan pariwisata belum efektif dan tidak sesuai dengan harapan perencanaan. Kebijakan pariwisata melibatkan sejumlah ide dan pernyataan yang dapat diimplementasikan melalui perencanaan pariwisata (Wilkinson, 1997). Hirschmann (1976) menyarankan kebijakan pariwisata berbeda dari banyak kebijakan lain yang dibuat oleh pemerintah (Supriadi,dkk, 2017:33).

Referensi konflik menyimpulkan bahwa perencanaan pariwisata adalah proses politik bahwa kebijakan pariwisata yang diputuskan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan pariwisata. Gunn (1988) dan Veal (1944) juga menegaskan bahwa perencanaan pariwisata sangat banyak dipengaruhi oleh proses politik. Kebijakan pariwisata adalah pelaksanaan rencana pariwisata. Manajemen pariwisata melibatkan pengawasan dan pemantauan yang berkelanjutan tentang dampak dari rencana pariwisata dan kebijakan pariwisata. Hubungan antara perencanaan dan manajemen agak lebih kompleks, salah satu peran penting dari manajer sebagai proses utama manajemen adalah perencanaan, oleh karena itu kegiatan perencanaan dan proses manajemen cenderung terjadi secara simultan dalam konteks tertentu.

### **3. Dinas Pariwisata**

Di dalam Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Tata Kerja dan

Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, fungsi dari Dinas Pariwisata sebagai berikut: perumusan kebijakan di bidang destinasi pariwisata pemasaran pariwisata pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; pelaksanaan kebijakan di bidang destinasi pariwisata pemasaran pariwisata pengembangan ekonomi *my creative* melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif pelaksanaan penatausahaan Dinas Pariwisata dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pemberdayaan masyarakat Dinas Pariwisata mengutamakan konsep pemberdayaan masyarakat dalam rangka memproduksi literasi dan melaksanakan upaya pengembangan desa wisata, pengembangan masyarakat dilaksanakan bersama dengan kelompok masyarakat secara koordinatif dan terpadu dengan prinsip transparan partisipatif dan akuntabilitas serta mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang ada dan berkembang di masyarakat. Dinas Pariwisata dalam mengembangkan desa wisata Di Kabupaten Semarang yaitu dengan strategi pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, dan pengembangan kemitraan pariwisata.

Dalam pengembangan desa wisata menurut Perda No 2 Tahun 2019 tentang pemberdayaan desa wisata, pemerintah daerah mempunyai tugas

dalam menyediakan informasi kepariwisataan perlindungan hukum keamanan dan kenyamanan wisatawan; memelihara mengembangkan dan melestarikan adat daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; mengendalikan kegiatan desa wisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia tentang kepariwisataan membangun sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata di desa wisata memberikan kemudahan regulasi yang menunjang Kemajuan pembangunan dan pengembangan desa wisata memberikan bantuan keuangan kepada pengelola desa wisata sesuai kemampuan keuangan daerah dan fasilitasi pembiayaan terhadap penyediaan modal dalam pelaksanaan program pemberdayaan desa wisata. pemerintah daerah berkewajiban memprioritaskan dan memperkuat kegiatan pariwisata yang berkontribusi kepada perbaikan kesejahteraan ekonomi pendapatan masyarakat desa kualitas lingkungan hidup dan budaya.

## **B. Penelitian Relevan**

Dalam melaksanakan suatu penelitian, patut mengacu pada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan optimal. Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu mengangkat tentang konsep pengembangan kawasan desa wisata, diantaranya adalah:

1. Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Vianda Kushardianti Muzha, Heru Ribawanto, dan Minto Hadi. Pada tahun 2013 dengan judul “Pengembangan Agrowisata dengan Pendekatan *Community Based Tourism* (Studi pada Dinas Pariwisata Kota Batu dan Kusuma Agrowisata Batu)”. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis data yang digunakan yaitu model analisis deskriptif. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pengembangan agrowisata di Kota Batu dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata. Program-program pelatihan yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu adalah berupa pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang ada. Upaya-upaya untuk pengembangan agrowisata di Kota Batu yang melibatkan seluruh stakeholders termasuk masyarakat di dalamnya, Program-program tersebut antara lain adalah dengan melakukan kerjasama/kemitraan dengan institusi swasta yang berkomitmen penuh terhadap kemajuan sektor pariwisata berbasis pertanian, yaitu melakukan partnership dengan Kusuma Agrowisata. Sehingga potensi wisata yang dimiliki bisa mensejahterakan masyarakat Kota Batu karena konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat merupakan langkah efektif untuk menjadikan sektor pariwisata memberikan manfaat optimal kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pengembangan

agrowisata di Kota Batu sudah sangat memadai, mulai dari sarana pokok (hotel, rumah makan, dan biro perjalanan), sarana pelengkap (sarana rekreasi dan sarana olah raga), dan sarana penunjang (panti pijat). Prasarana umum dan prasarana kebutuhan pokok pola hidup modern dan tersebar dengan baik. Berbagai macam bentuk promosi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu banyak dipengaruhi oleh kebutuhan dinas serta berdasarkan target peningkatan komoditas pariwisata untuk menambah devisa Negara. Dalam melakukan promosi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu bekerjasama dengan pihak Kusuma Agrowisata. Adapun faktor pendukung dan penghambat yaitu faktor pendukung pengembangan agrowisata di Kota Batu adalah Kota Batu ini berada di daerah yang mempunyai tanah yang sangat subur. Sebagian besar wilayahnya terdiri dari pegunungan dan perbukitan. Melihat potensi yang dimiliki oleh kota Batu yang berada di daerah pegunungan ini memiliki iklim yang cenderung dingin. Hal ini yang membuat daya tarik wisata di Kota Batu semakin bertambah. Sebagian wisatawan cenderung ingin menikmati udara dingin yang ada di Kota Batu. Kemudian, faktor penghambat pengembangan agrowisata di Kota Batu adalah Rendahnya kemampuan dan keterbatasan wawasan masyarakat dalam hal kepariwisataan dan Belum mantapnya koordinasi kebijakan antara pemerintah dengan masyarakat.



2. Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Fariza karya dan Rima Dewi Suprihardjo pada tahun 2014 yang berjudul “Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan konsep pengembangan kawasan desa wisata di Desa Bandungan, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan. Permasalahan yang terjadi antara potensi sumber daya alam dengan sumber daya manusia adalah masyarakat tidak mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada untuk memanfaatkan sebagai potensi wisata di kawasan ini hal ini dapat dilihat dari masih belum ada data dari Dinas Pariwisata yang menyatakan adanya aktivitas kegiatan wisata di desa Bandungan hanya masyarakat sekitar Desa Bandungan dan masyarakat perkotaan yang melewati Desa Bandungan sekedar melihat pemandangan alam yang terbentang tanpa mengetahui bahwa mereka juga bisa berinteraksi dengan masyarakat setempat untuk mengetahui produk lokal seperti barang kerajinan, makanan khas, minuman dan produk-produk lainnya yang memberikan cita rasa kepada wisatawan tentang daerah tersebut. selain itu juga belum adanya penyediaan fasilitas dan prasarana yang dimiliki masyarakat lokal yang biasanya mendorong peran serta masyarakat dan menjamin adanya akses ke sumber fisik

merupakan batu loncatan untuk berkembangnya desa wisata. Berdasarkan analisa dilakukan mengenai karakteristik Desa Bandungan telah diketahui bahwa karakteristik desa wisata yang dibedakan ke dalam dua aspek yaitu aspek sosial dan aspek fisik. Karakteristik aspek sosial terdiri dari kegiatan sehari-hari masyarakat dan sistem adat yang masih berlaku dan aspek fisik terdiri dari sarana dan prasarana yang terdapat di desa Bandungan. Faktor-faktor pendukung pengembangan kawasan desa wisata di desa Bandungan yaitu media promosi sebagai pengenalan kawasan desa wisata di desa Bandungan ke masyarakat luar, pengelolaan dari masyarakat setempat agar ikut berperan aktif dalam pengembangan kawasan desa wisata, kebijakan pemerintah dalam mengontrol pengembangan kawasan desa wisata di desa Bandungan.

3. Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh T Prasetyo Hadi Atmoko pada tahun 2014 dengan judul “Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun Penelitian yang dilakukan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pengembangan potensi desa wisata Brajan. Dusun Brajan yang berada di kecamatan minggir menjadi desa wisata budaya dan sentra kerajinan bambu di Yogyakarta. Hingga saat ini ada sekitar 110 jenis kerajinan bambu yang dihasilkan dari

pengrajin di Dusun Brajan tidak hanya dipasarkan secara lokal kerajinan bambu dari desa wisata Brajan ini sudah merambah pasar internasional. Berdasarkan hasil penelitian bahwa potensi yang dimiliki oleh Desa Brajan memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata potensi yang dimiliki Desa Brajan adalah 1) kerajinan bambu, 2) kesenian yang menjadi potensi wisata, kesenian yang dimiliki oleh Desa Brajan adalah kuntulan, seni religius islami, campursari karawitan, *cokekan*, dan shalawatan, 3) Keindahan alam, 4) penginapan desa wisata Brajan menyediakan penginapan atau inap desa dengan kapasitas 10 sampai 15 orang. Strategi pengembangan potensi desa wisata Brajan pemasaran kerajinan bambu di Dusun Krajan ini menggunakan analisis SWOT yaitu a) peluang (*opportunities*) Dusun Brajan adalah produk kerajinan yang merupakan andalan ekspor Daerah Istimewa Yogyakarta, Tanaman bambu menjadi salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia untuk dimanfaatkan, keperluan perabot rumah tangga dan lain-lain, keahlian para pengrajin dapat membuat berbagai macam kerajinan dari bambu yang dapat menarik wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. b) Kekuatan (*strength*) Dusun Brajan adalah mempunyai usaha kecil menengah yang bergerak di bidang industri kerajinan bambu dan sangat berpotensi untuk menembus pasar domestik mancanegara, lebih dari 150 jiwa di Dusun Brajan berprofesi sebagai pengrajin bambu, telah

ditetapkan sebagai desa wisata sentra kerajinan bambu oleh pemerintah Kabupaten Sleman, usaha kerajinan tangan tidak tergesur oleh industri modern. c) ancaman (*threats*) produk yang monoton akan membuat pembeli merasa bosan dan tidak tertarik. d) Kelemahan (*weakness*), Dusun Brajan juga menghadapi beberapa problematika dalam mengembangkan industri kerajinan bambu nya yaitu desain produk yang masih sangat sederhana dan kurang inovatif, kualitas keawetan produk yang belum terjamin, Manajemen Pemasaran yang sangat konvensional serta cenderung pasif, etos wirausaha yang lemah sehingga dapat mengganggu proses produksi.

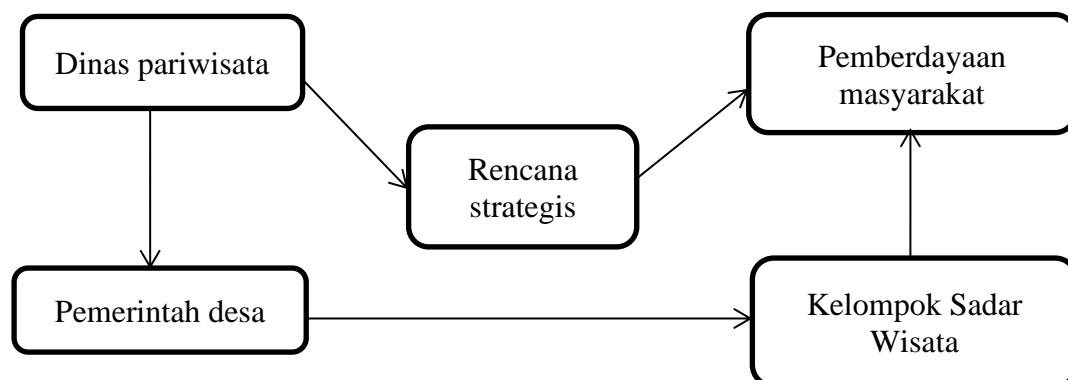
### **C. Kerangka Berfikir**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata dan kendala dalam memberdayakan masyarakat oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Dapat dijelaskan bahwa pengembangan desa wisata sebagai suatu proses untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat desa, pengembangan desa wisata ini sebagai bentuk usaha-usaha untuk meningkatkan fasilitas wisata dalam memenuhi kebutuhan wisatawan. Dalam hal ini, masyarakat lokal berperan penting dalam pengembangan desa wisata yaitu berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan terhadap pengembangan desa wisata serta

peran masyarakat lokal ini dalam perencanaan desa wisata diharapkan berperan aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan. Dari potensi lokal Desa Lerep yang mempunyai sumber daya alam yang dapat menarik wisatawan ini mempunyai beberapa paket wisata yang ditawarkan, mulai dari wisata alam sampai wisata edukasi. Oleh karena itu dengan adanya pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dapat membantu masyarakat Desa Lerep dalam mengembangkan desa wisata yang diharapkan mempunyai dampak positif yaitu lapangan kerja baru, peningkatan penjualan produk lokal, dan peningkatan pembangunan infrastruktur desa. Dari strategi Dinas Pariwisata dalam mengembangkan desa wisata, ada beberapa program yaitu program pembinaan desa wisata, festival desa wisata, sosialisasi dan promosi, pelatihan *workshop*, dan temu mitra.

Dengan adanya desa wisata ini, Desa Lerep membentuk sebuah organisasi yaitu kelompok sadar wisata, yang dibentuk dari masyarakat yang mempunyai kepedulian dan tanggung jawab terhadap desa wisata. Kelompok sadar wisata ini mempunyai kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memajukan, meningkatkan dan mempromosikan desa wisata lerep sampai luar daerah. Dari dibentuknya kelompok sadar wisata ini diharapkan mampu dalam memahami kondisi lingkungan sosial dan budaya yang dimiliki Desa Lerep termasuk potensi yang ada didalamnya sehingga kegiatan pengembangan pariwisata dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan menghasilkan manfaat bagi

masyarakat. Kemudian, tidak lepas dari peran pemerintah desa yang sangat berperan penting dalam membina dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata lereng. Dan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang juga berperan dalam memberikan pembinaan dan pelatihan tentang bagaimana mengelola dan memberikan pemahaman mengenai desa wisata yang baik dan bernilai ekonomi tinggi. Dalam bidang pemasaran desa wisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang memberikan kegiatan promosi untuk menarik minat wisatawan dengan melaksanakan penyelenggaraan event serta berpartisipasi dalam event/pameran promosi pariwisata dan sebagainya. Berdasarkan penelitian yang diambil, maka desain yang akan dilaksanakan dapat digambarkan dalam kerangka teoritik sebagai berikut.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang (Studi Kasus: Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang), maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang sebagai langkah terwujudnya industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang sesuai dari mekanisme Peraturan Daerah No 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata dan Peraturan Gubernur No 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis dari Perda No 2 Tahun 2019. Keterlibatan masyarakat Desa Lerep dalam pengembangan desa wisata yaitu keterlibatan dalam pelaksanaan program, program yang diberikan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dalam mengembangkan desa wisata yaitu program pembinaan desa wisata, program pelatihan desa wisata, festival desa wisata, program temu mitra desa wisata, dan program sosialisasi dan promosi. Hasil dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan yaitu peningkatan pendapatan masyarakat, peluang

lapangan pekerjaan, dan peningkatan usaha produk lokal masyarakat menjadi di kenal.

2. Kendala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang secara internal yaitu a) pendanaan pembangunan desa wisata Lerep; b) SDM terbatas. Kemudian kendala secara eksternal yaitu 1) memperluas target pasar, dalam memperluas target pasar dengan menawarkan objek wisata di Desa Lerep, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan yang masih menjadi kendala, yaitu rendahnya daya saing objek wisata di Desa Wisata Lerep; rendahnya kualitas produk wisata, baik obyek wisata penginapan, restoran, transportasi (amenitas, aksesibilitas, atraksi); dan belum optimalnya pola kemitraan kepariwisataan di Desa Lerep; 2) pengetahuan dan keterampilan masyarakat Desa Lerep terhadap desa wisata masih kurang; 3) sarana dan prasarana pariwisata kurang memadai; 4) pendanaan pembangunan desa wisata Lerep; dan 5) keterlibatan masyarakat.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, (Studi Kasus: Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang), maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut.

1. Kelompok Sadar Wisata (pokdarwis) sebagai pengelola desa wisata perlu meningkatkan sarana dan prasarana desa wisata, memberikan



fasilitas yang dapat menjadi daya tarik wisatawan datang, seperti pengadaan toko cinderamata yang unik, menambah pengadaan *spot selfie*.

2. Kelompok Sadar Wisata (pokdarwis) perlu dalam menemukan inovasi yang berbeda dalam pengelolaan desa wisata, seperti mengadakan event atau perlombaan secara kreatif dan inovatif sehingga promosi desa wisata juga ikut terangkat.
3. Kelompok Sadar Wisata (pokdarwis) perlu meningkatkan kerjasama dari berbagai *stakeholder* baik dari pemerintah maupun swasta untuk pengembangan dan perbaikan objek wisata yang sudah dikemas melalui paket wisata.
4. Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang sebagai pelaku pemberdayaan masyarakat perlu meningkatkan pelatihan dan kesadaran agar masyarakat tidak jenuh dalam pengelolaan desa wisata.
5. Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang perlu memberikan solusi terkait hal pendanaan bagi desa wisata untuk mengembangkan sarana dan prasarana wisata dengan cara pendampingan dalam pembuatan proposal bantuan keuangan desa wisata ke pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dan memberikan bimbingan cara *manage* keuangan hasil dari paket wisata.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Amerta, I Made Suniastha , 2019. *Pengembangan Pariwisata Alternatif*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Aminah, & Roikan. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi:CV Jejak.
- Antara, Arida. 2015. *Panduan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Potensi Lokal*. Jakarta: Konsorium Riset Pariwisata Universitas Udayana Bali.
- Anwas, Oos M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung:Alfabeta.
- Damanik, Janianton,dkk. 2018. *Membangun Pariwisata dari Bawah*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Damanik, Sarintan Efratani. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Marsono. 2019. *Agro dan Desa Wisata*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Moeloeng, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Moeloeng, Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Pitana, I Gede, dkk. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta. Andi.
- Prasetyo & Arifin. 2002. *Pengelolaan Destinasi Wisata yang Berkelanjutan dengan sistem Indikator Pariwisata*, Jakarta: Indocamp.
- Rahim, Firmansyah. 2012. *Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata*. Jakarta: Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Semiawan, Conny R. 2010. *“Metode Penelitian Kualitatif”*. Jakarta:2010.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supriadi. 2017. *Perencanaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Malang: Universitas Negeri Malang.

Zebua, Manahati. 2016. *Inspirasi Pengembangan Pariwisata Daerah*. Yogyakarta: Budi Utama.

Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta:Kencana.

### **Jurnal**

Zakaria, Faris, dan Rimadewi Suprihardjo. "Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan." *Jurnal Teknik ITS* 3.2 (2014): C245-C249.

Muzha, Vianda Kushardianti. "Pengembangan agrowisata dengan pendekatan community based tourism (studi pada dinas pariwisata Kota Batu dan Kusuma agrowisata batu)." *Jurnal Administrasi Publik* 1.3 (2013): 135-141.

Atmoko, T. Prasetyo Hadi. Strategi pengembangan potensi desa wisata Brajan kabupaten Sleman. *Media Wisata*, 2014, 12.2.

### **Undang-undang**

Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisatanaan.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata.

Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata.

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No 8 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Semarang tahun 2020-2025.

Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja, Dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.